



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP 2024

Disusun Oleh
KECAMATAN JOMBANG



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Jombang, 20 Januari 2025

KAMAT JOMBANG

Drs. HERI PRAYITNO

Pembina Tk.I

NIP. 196708241986021002

BAB I

PENDAHULUAN

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2024-2026, Kecamatan Jombang berperan menjalankan salah satu tujuan dari 4 tujuan yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”** dengan sasaran **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”** serta mendukung pencapaian Tema Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yaitu “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul dengan tiga prioritas pembangunan yang menjadi titik beratnya, salah satunya adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketentraman Umum”.

1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 52/D);

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang. Sedangkan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;

- Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan;
- Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan tugas pembantuan;
- Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu Sekretaris untuk untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Jombang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Umum :

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Jombang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- Pelaksanaan tugas pembantuan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

- Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Sosial Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Kelurahan

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan tugas Camat beserta pejabat struktural dibawahnya diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat setempat secara berjenjang.

1. LURAH mempunyai tugas membantu Camat dalam:

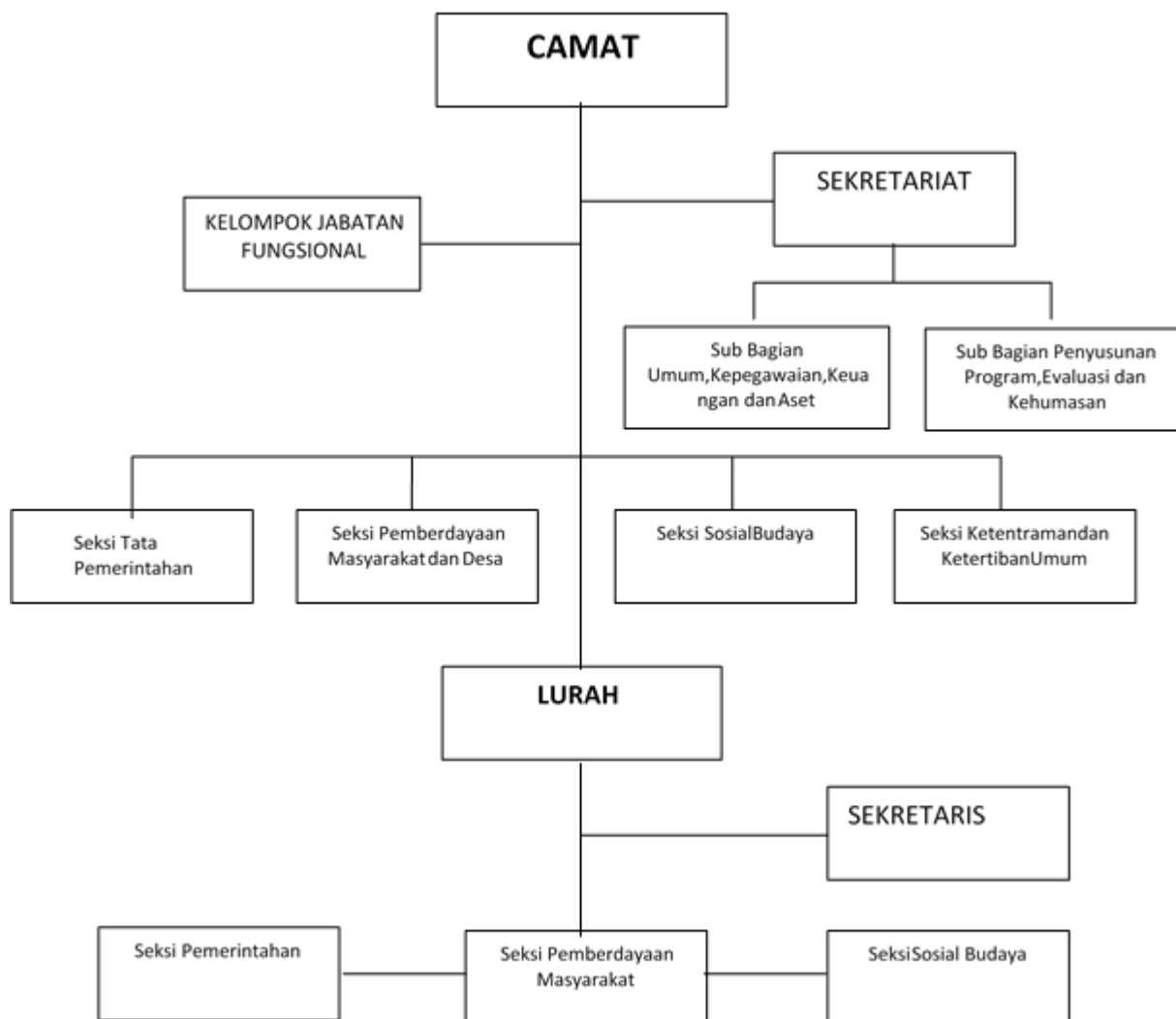
- Melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan
- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelurahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Lurah.
- b. Sekretaris.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

- e. Seksi Sosial Budaya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Lurah.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jombang



Sumber: Data diolah, 2025

Data Kepegawaian

a. Sarana Pendukung Organisasi

Keberadaan sarana pendukung akan berpengaruh terhadap laju gerak suatu organisasi. Mutu tingkat sumberdaya manusia yang dimiliki, yang didukung dengan adanya sarana yang memadai akan sangat berpengaruh pada kinerja dari organisasi. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun sarana pendukung yang ada tanpa didukung oleh personil dengan kapabilitas yang memadai akan menambah deretan barang inventaris organisasi yang tidak efektif.

Untuk membantu tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, sarana kerja yang terdapat di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sudah baik dan akan tingkatkan sampai pada tingkat optimal. Artinya bahwa sarana yang ada sudah mampu mendukung beban kerja yang ada, walaupun belum secara optimal.

b. Metode Organisasi

Untuk mencapai tujuan dari organisasi (dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di daerah), maka pelaksanaan koordinasi (baik tingkat internal maupun eksternal) terus diupayakan. Penyebab kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan perencanaan, sebagian besar disebabkan karena lemahnya tingkat koordinasi. Untuk itu koordinasi harus selalu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan yang tepat dan konsisten dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi, baik dalam sektor-sektor tertentu maupun lintas sektor. Guna meminimalisir kekurangan serta kendala yang terjadi, maka diperlukan adanya standar metode kerja.

Hal ini dituangkan dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dilakukan review terakhir kali pada tahun 2024. Standar tersebut menginformasikan terkait langkah, pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan administrasi kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jombang.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, maka pada tahun berikutnya harus direncanakan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP). Akan tetapi sampai saat ini belum bisa terlaksana dikarenakan adanya penyesuaian prioritas pendanaan.

c. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Sebagai gambaran tingkat pendidikan sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI KECAMATAN JOMBANG
TAHUN 2024

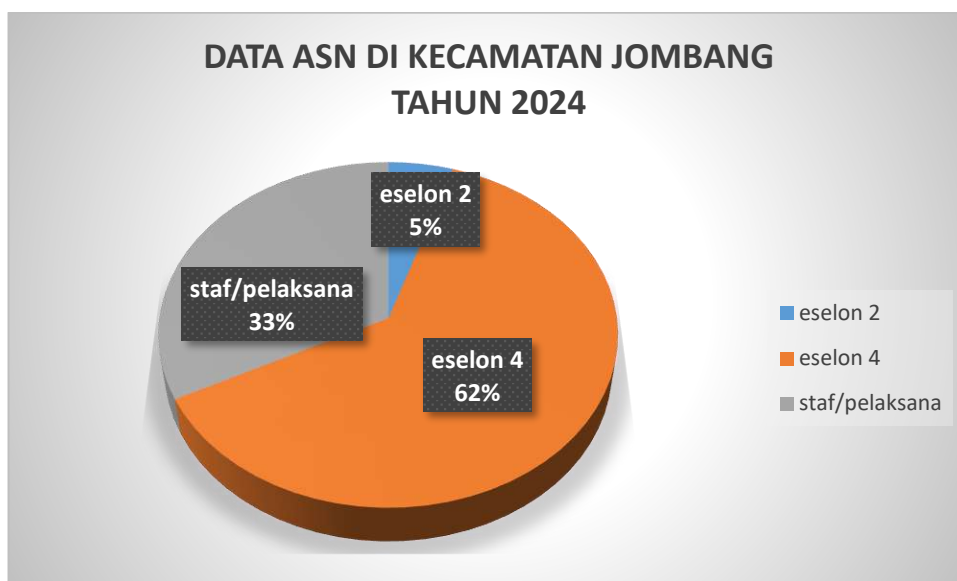
No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1.	Pasca Sarjana	6
2.	Sarjana (S1) atau sederajat	17
3.	Sarjana Muda (Amd)	-
4.	Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat	17
5.	Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat	-
	Jumlah	40

Sumber: diolah, Kec. Jombang 2025

Berdasar tabel tingkat pendidikan pegawai terlihat bahwa tingkat pendidikan personil Kecamatan Jombang yang terbanyak berpendidikan SI. Sedangkan untuk jabatan struktural rata-rata tingkat pendidikan adalah S1. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

Pejabat struktural di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Eselon III terdiri dari 2 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 25 orang 8 orang Perempuan dan 17 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Kecamatan Jombang walaupun masih didominasi oleh laki-laki. Jumlah pejabat struktural dijelaskan pada grafik 2.1. berikut.

Grafik 2.2.



Sumber: diolah, Kec.Jombang, 2025

Sedangkan untuk tingkat golongan dan berdasarkan jenis kelamin pada pegawai Kecamatan Jombang pada tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Berdasar tabel tingkat golongan dapat dipahami, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Jombang yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 31 orang atau 70% dari seluruh ASN Kecamatan Jombang.

Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum mampu menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, namun masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana khususnya di teknis perencanaan dan Kegiatan, khususnya yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Goverment* di Kecamatan. Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa/ Kelurahan.
6. Kecamatan Jombang merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya jumlah aparatur sipil di Kecamatan Jombang yang mempengaruhi efisiensi pelayanan.
2. Kompetensi personil aparatur pelayanan yang kurang masih perlu ditingkatkan.
3. Belum adanya Sistem Informasi yang terintegrasi Tingkat Kecamatan ke Desa
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

1. 7. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Nomor : X.700/542/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d Semester I Tahun 2024, Kecamatan Jombang memperoleh nilai 74,91 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil reviu sebagai berikut:

A. Kondisi Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 22,81 dari bobot 30 % dengan capaian 83,23 % (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan.

2. Evaluasi dan Pengukuran

Evaluasi kinerja atas pengukuran kinerja dengan nilai 22,82 dari bobot 30% atau dengan capaian 76,03 % (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun terdapat hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi lapangan yaitu Sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,88 dari bobot 15% atau dengan capaian 52,53% (BB) yang berarti kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah Upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat atau pemberi layanan umum namun Sebagian pegawai belum memahami hal tersebut

4. Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 19,25 dari bobot 25% atau dengan capaian 77% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB II

IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,453 atau sama dengan 45,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel DAK Fisik (X_1) dan variabel DAK Non Fisik (X_2) secara simultan (bersama-sama) berdampak terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 45,3%. Sedangkan sisanya ($100\% - 45,3\% = 54,7\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor public dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi ke arah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Jombang pada periode Tahun 2024 - 2026

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Kecamatan Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP
2. Nilai IKPP Kecamatan Jombang

Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Subkegiatan:

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Subkegiatan:

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Subkegiatan:

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan:

- 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan:

- 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Subkegiatan:

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Subkegiatan:

1. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

1. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

3. Sub Kegiatan : peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan
- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan
Sub kegiatan :
 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 2. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
 3. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Subkegiatan:
 1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Rencana kinerja Kecamatan Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Tahun 2024.

2.2. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

2.2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Jombang atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Kecamatan Jombang Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Jombang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pengantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.2.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jombang	BB (75)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jombang	8,0

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten	95	17.660.000	17.660.000
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%	17.310.000	17.310.000
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	18.580.000	18.580.000
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	76.535.000	86.360.000
			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan	100%	3.889.369.219	3.894.618.944
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan dan monev social budaya yang dilaksanakan	100%	66.507.500	66.507.500

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase Rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	7.211.737.642	7.350.305.207
		Jumlah			11.297.699.361	11.451.341.651

2.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Jombang dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.2.2

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Jombang tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Jombang	Camat Jombang
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai IKPP Kecamatan Jombang	Nilai IKPP Kecamatan Jombang tahun n	Hasil IKPP Kec. Jombang	Camat Jombang

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jombang, yaitu:

Tabel 2.5
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec Jombang ----- x100% Jumlah PNS Kec Jombang	Kec Jombang
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan ----- x100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan	Kec Jombang
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun.	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n	Kec Jombang
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	5 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n	Kec Jombang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
			penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ----- $\times 100\%$ Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan	Kec Jombang
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ----- $\times 100\%$ Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42/bulan bulan	Jumlah orang yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Jombang yang di fasilitasi tahun n	Kec Jombang
1.2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1 Dokumen	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun tahun n	Kec Jombang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
			keuangan akhir tahun SKPD			
1.2.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian PD -----x100% Pelayanan administrasi kepegawaian yang ditargetkan	Kec Jombang
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	42 paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi tahun n	Kec Jombang
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ----- x100% Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan	Kec Jombang dan Kelurahan
1.4.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	11 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan tahun n	Kec Jombang
1.4.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n	Kec Jombang
1.4.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan di tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana ----- x100% Pengadaan sarana dan prasarana yang ditargetkan	Kec Jombang dan Kelurahan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 unit	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.4.2	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0 gedung	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah ----- x100% Jumlah perencanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan	
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	6 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.6	Pemeliharaan	Terlaksananya	Persentase Barang	85%	Jumlah Barang milik daerah	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah dalam kondisi baik		dalam kondisi baik ----- x100% Jumlah Barang milik daerah	
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	35 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.6.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	30 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara	5 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara tahun n	Kec Jombang dan Kelurahan
2.	Program	Meningkatnya	Nilai PATEN	94	Nilai PATEN Kecamatan	Kec.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan		Jombang tahun n	Jombang
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ----- x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)	
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen penningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 laporan	Jumlah dokumen penningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan -----x100% Jumlah dokumen penningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditargetkan	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA ----- x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan	Kec. Jombang
			Persentase rekomendasi forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi forkopimcam yang terlaksana	
3.1	Penyelenggaran Urusan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan	Jumlah laporan pelaksanaan	4 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	PHBN/ PHBA		PHBA tahun n	
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam	4 rekomendasi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam tahun n	
3.1.1	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya Fasilitas, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 Orang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa tahun n	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 dokumen	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan tahun n	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait ----- x100% Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Kec. Jombang
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran perda/perkada dan	12 Laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	dan Peraturan Kepala Daerah	Kepala Daerah	trantibum yang dilaksanakan			
4.1.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	12 Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia tahun n	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ----- x100% Jumlah Desa	Kecamatan Jombang
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawabana n APBDes dengan lengkap	16 Desa	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ----- x100% Jumlah Desa	
5.1.1	Fasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Dokumen	32	Jumlah Dokumen yang	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun	
6	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya perencanaan pembangunan secara tepat waktu	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga Pemberdayaan masyarakat yang aktif	100 %	Jumlah lembaga/badan usaha pemberdayaan masyarakat yang aktif ----- x 100% jumlah lembaga/badan usaha pemberdayaan di desa	Kecamatan Jombang
		Terlaksanakannya capaian kinerja kelurahan yang dievaluasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan	100%	Jumlah laporan kegiatan kelurahan yang disusun ----- -----x 100% jumlah kegiatan kelurahan	
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksanakannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	16 Desa	Jumlah Pengajuan RKPDes yang tepat waktu tahun	
			Jumlah lembaga/badan Usaha dan Pemberdayaan kemasyarakatan desa yang dibina	36 lembaga	Jumlah lembaga/badan kemasyarakatan desa yang dibina tahun	
6.1.1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	4 Laporan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan tahun	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	wilayah kecamatan	kecamatan	masyarakat di wilayah kecamatan			
6.1.2	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musaywarah Perencanaan Pemabngunan di Desa	25 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi pada tahun n	
6.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanakannya koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Persentase pokmas/ormas yang difasilitasi	100 %	Persentase pokmas/ormas yang difasilitasi tahun n	Keluraha n
6.2.1	Pembangunan Sar anadan Prasarana kelurahan Kepanj en	Meningkatnya Pemba ngunan Saranadan Pras arana kelurahan Kepanjen	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan Kepanj en yang terbangun	2 lokasi	Jumlah Saranadan Prasarana ke lurahan Kepanjen yang terbangun tahun n	Kelurah an
	Pembangunan Sar anadan Prasarana kelurahan Kaliwu ngu	Meningkatnya Pemba ngunan Saranadan Pras arana kelurahan Kaliwungu	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan Kepanj en yang terbangun	2 lokasi	Jumlah Saranadan Prasarana ke lurahan Kepanjen yang terbangun Tahun n	Kelurah an
	Pembangunan Sar anadan Prasarana kelurahan Jombat an	Meningkatnya Pemba ngunan Saranadan Pras arana kelurahan Jombatan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan Kepanj en yang terbangun	3 lokasi	Jumlah Saranadan Prasarana ke lurahan Kepanjen yang terbangun Tahun n	Keluraha n
	Pembangunan Sar anadan Prasarana kelurahan Jelako	Meningkatnya Pemba ngunan Saranadan Pras arana	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan Kepanj	2 lokasi	Jumlah Saranadan Prasarana ke lurahan Jelakomboyangterban gun Tahun n	Kelurah an

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	mbo	kelurahanJelakombo	enyang terbangun			
6.2.2	PemberdayaanMasyarakatKelurahanKepanjen	TerfalisitasinyapembudayaanmasyarakatkelurahanKepanjen	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	25 kegiatan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun n	Kelurahan
	PemberdayaanMasyarakatKelurahanKaliwungu	TerfalisitasinyaPembudayaanMasyarakatKelurahanKaliwungu	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	40kegiatan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun n	Kelurahan
	PemberdayaanMasyarakatKelurahanJombatan	TerfalisitasinyaPembudayaanMasyarakatKelurahanJombatan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	34 kegiatan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun	Kelurahan
	PemberdayaanMasyarakatKelurahanJelakombo	TerfalisitasinyaPembudayaanMasyarakatKelurahanJelakombo	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	40kegiatan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun n	Kelurahan
6.2.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	50 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kelurahan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)	lokasi
	perencanaan pembangunan di Kelurahan	perencanaan pembangunan di Kelurahan	musyawarah perencanan pembangunan di Kelurahan		tahun n	
6.3	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatanyang dibina	25 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatanyang dibina	
6.3.1	Penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	25 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan tahun n	
6.3.2	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	25 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya tahun n	
6.3.2	Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Terfasilitasinya Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan	25 lembaga	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Jombang sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	>90 s/d 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	Baik
CC	> 50 s/d 60	Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	Agak Kurang
D	0 s/d 40	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari

0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Jombang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan tahun 2024.

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jombang diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Jombang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jombang tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan Kecamatan:

Tabel 3.1
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Jombang	75	74,91	99,88%
Meningkatnya kualitas layanan Publik	Indek Kualitas Pelayanan public (IKPP) Kecamatan Jombang	8,0	7,82	97,75%
Rata-rata Capaian IKU				98,8 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian IKU Kecamatan Jombang pada tahun 2024 telah tercapai 98,8% (sangat memuaskan).

2. Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Jombang dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jombang dengan target tahun 2024 adalah 75 dapat terealisasi 74,91 tercapai sebesar 99,88 % (masih dibawah target). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Nilai AKIP mengalami kenaikan dari sebelumnya 74,56 menjadi 74,91 walaupun tidak secara signifikan. Dari hasil evaluasi AKIP Kecamatan Jombang ada beberapa yang perlu mendapat perhatian yaitu Sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan periode berikutnya selain itu organisasi belum menrapkan pemberian penghargaan dan sanksi

3. Sasaran ke II : Meningkatkan kualitas layanan public

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Jombang dengan indikator kinerja indek kualitas pelayanan publik (IKPP) Kecamatan Jombang. Nilai IKPP didasarkan penggabungan dari nilai IKM dan Nilai IPP 2024. Nilai IKPP Kecamatan Jombang dengan target tahun 2024 adalah 8,0 dapat terealisasi 7,82

tercapai sebesar 97,75 % (masih dibawah target). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Nilai IKPP mengalami penurunan dari sebelumnya 7,91 menjadi 7,82 atau turun sebesar 2% :

a. IKM Kecamatan Jombang

IKM Kecamatan Jombang target tahun 2024 adalah 90 dapat terealisasi 92,32 (tercapai 102,57%). Nilai IKM Kecamatan Jombang pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi ketidaktersedianya blanko KTP oleh dinas pengampu yang mengakibatkan pemohon KTP merasa kecewa.. Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Jombang per jenis layanan:

NO	JENIS LAYANAN	IKM 2024
1.	KTP	89,03
2.	KK	93,69
3.	SKCK	92,96
4.	Mutasi / Pindah Kependudukan	92,75
5.	Surat Keterangan Lainnya	94,01
IKM Unit Layanan		92,32

Perbandingan Indeks Kepuasan Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

No	Jenis layanan	IKM			Kinerja Unsur
		2022	2023	2024	
1.	KTP	83,12	91,85	89,03	Baik
2.	KK	82,87	91,97	93,69	Sangat Baik
3.	SKCK	0	0	92,96	Sangat Baik
4.	Mutasi / Pindah Kependudukan	97,22	96,98	92,75	Sangat Baik
5.	Surat Keterangan Lainnya	0	88,77	94,01	Sangat Baik
	IKM Unit Layanan	87,74	93,14	92,32	

b. IPP Kecamatan Jombang

IPP Kecamatan Jombang target tahun 2024 adalah 3,3 dapat terealisasi 3,20 (tercapai 98%) masih dibawah target . Nilai IPP Kecamatan Jombang pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukan bahwa kantor Kecamatan Jombang masih belum ada peningkatan.

Berikut ini capain Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 yang tersaji pada tabel 3.2, dimana tabel tersebut melaporkan tentang capaian Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai dengan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan target yang telah ditentukan dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2024.

Tabel 3.2
Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	5 laporan	5 laporan	100%
1	Program penunjang	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase rata-rata	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	aparatur	capaian kinerja aparatur			
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.2.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	100%	100%
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	42 paket	42 paket	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%
1.3.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor kec. Jombang	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	4 jenis	4 jenis	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan Kel. Jombatan	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor Kel. Kepanjen	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor Kel. Kaliwungu	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	11 Paket	11 Paket	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi	4 Paket	4 Paket	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
	/penerangan bangunan kantor Kel. Jelakombo		listrik/Penerangan bangunan kantor			
1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Kecamatan Jombang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Jombang	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	22 paket	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Jelakombo	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kel. jelakombo	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Kepanjen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kel.Kepanjen	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Jombatan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Jombatan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	6 paket	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Kaliwungu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Kaliwungu	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Paket	25 Paket	100%
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor di Kec. Jombang	Tersedianya bahan logistik kantor di Kec. Jombang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor Kel. Jelakombo	Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Jelakombo	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	100%
	Penyediaan bahan logistik	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan	11 paket	11 paket	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
	kantor Kel. Kepanjen	Kel. Kepanjen	logistik kantor yang disediakan			
	Penyediaan bahan logistik kantor Kel. Jombatan	Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Jombatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor Kel. Kaliwungu	Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Kaliwungu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	100%
1.3.4	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Jombang	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	100%
1.3.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kecamatan Jombang	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Jelakombo	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Jombatan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	6 Laporan	6 Laporan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			konsultasi SKPD			
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Kaliwungu	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Kepanjen	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.3.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jombang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel.Jelakombo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel.Jombatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel.Kepanjen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang	2 paket	2 paket	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
			disediakan			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel.Kaliwungu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	100%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kec. Jombang	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau banngunan laainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Jombatan	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau banngunan laainnya yang disediakan	8 Unit	8 Unit	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Jelakombo	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau banngunan laainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Kepanjen	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Kaliwungu	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
1.4.2	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	0
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik di Kec Jombang	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik di Kec. Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel.	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 laporan	12 laporan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
	air dan listrik kel. Jelakombo	Jelakombo	komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Kepanjen	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Kepanjen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Jombatan	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Jombatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Kaliwungu	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Kaliwungu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor di Kec. Jombang	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor di Kec. Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel.	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor Kel. Jelakombo	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 laporan	12 laporan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
	Jelakombo		pelayanan umum kantor			
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel. Kepanjen	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor Kel. Kepanjen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel. Jombatan	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor Kel. Jombatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel. Kaliwungu	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor Kel. Kaliwungu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	100%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Jombang	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	15 unit	15 unit	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Jombang	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yaang dipelihara dan dibayarkan pajak, perijinannya	5 unit	5 unit	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Jombang	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yaang dipelihara dan dibayarkan pajak, perijinannya	5 unit	5 unit	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Jombang	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yaang dipelihara dan dibayarkan pajak, perijinannya	5 unit	5 unit	100%
1.6.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana	TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	30 unit	30 unit	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
	Gedung kantor atau bangunan lainnya Kec. Jombang	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas i			
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Kel. Jelakombo	TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas i	10 unit	10 unit	100%
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Kel. Kepanjen	TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas i	10 unit	10 unit	100%
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Kel. Jombatan	TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas i	10 unit	10 unit	100%
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana	TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung			100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Gedung kantor atau bangunan lainnya Kel. kaliwungu	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	10 unit	
1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	94	93,67	99%
2.1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
2.1.1	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	Program	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase PHBN/	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum	PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan			
			Persentase rekomendasi forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100%
3.1.1	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	asilitasi, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 Orang	100 Orang	100%
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
4	Program Koordinasi	Meningkatnya Koordinasi	Persentase Laporan	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait			
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBdes dengan lengkap	16 desa	16 desa	100%
5.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	32 dokumen	32 dokumen	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan	100%	100%	100%
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Menyusun RKPDesa	16 Desa	16 Desa	100%
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	36 lembaga	100%
6.1.1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan	16 Laporan	16 Laporan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
	kecamatan		pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			
6.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pokmas dan Ormas yang difasilitasi	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Jelakombo	Meningkatnya sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit	2 Unit	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jombatan	Meningkatnya sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepanjen	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	4 Pokmas	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliwungu	Meningkatnya sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelakombo	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Kelompok	4 Kelompok	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
			Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepanjen	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Lembaga	19 Lembaga	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Kelurahan JOMBatan	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Lembaga	11 Lembaga	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelakombo	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
6.2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di bina	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Kecamatan				
6.2.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jombatan	Terlaksana Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	15 lembaga Kemasyaraka n	15 lembaga Kemasyaraka n	100%
6.2.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jelakombo	Terlaksana Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	15 lembaga Kemasyaraka n	15 lembaga Kemasyaraka n	100%
6.2.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kepanjen	Terlaksana Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	15 lembaga Kemasyaraka n	15 lembaga Kemasyaraka n	100%
6.2.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kaliwungu	Terlaksana Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	15 lembaga Kemasyaraka n	15 lembaga Kemasyaraka n	100%
6.2.2	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan Kelurahan Jombatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyrakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	10 lembaga	10 lembaga	100%
6.2.2	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyrakatan yang ditingkatkan	10 lembaga	10 lembaga	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
	Kelurahan Jombatan		Kapasitasnya			
6.2.2	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan Kelurahan Jombatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyrakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	10 lembaga	10 lembaga	100%
6.2.2	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan Kelurahan Jombatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyaraakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyrakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	10 lembaga	10 lembaga	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah fasilitasi Sarana dan Prasaran Lembaga Kemasyaratan yang di Sediakan			

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Pada tabel 3.1.2 di bawah ini menerangkan bahwa perbandingan Realisasi KInerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022, 2023 dan tahun 2024. Perbandingan sasaran strategis yang disertai dengan indicator kinerja, dengan satuan, target kinerja, realisasi dan capaian dalam persentase.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jombang
Tahun 2022 – 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Jombang	Nilai	70,01	70,37	100,5%	72	74,56	103,56%	75	74,91	99,88%
Meningkatnya kualitas Layanan Publik di Kecamatan Jombang	Indek Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Jombang	Nilai	N/A	N/A	N/A	7,0	7,91	113%	8,0	7,82	97,75%

Program	Indikator Program	Target Tahunan	Realisasi		
			2022	2023	2024
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai paten Kecamatan	95	84,47	92,64	93,67
Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan Monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%

Program	Indikator Program	Target Tahunan	Realisasi		
			2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%
	Persentase rata-rata capaian kinerja kelurahan	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indicator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan jombang mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, tahun 2022 tercapai 100,5%, tahun 2023 tercapai 103,56% mengalami peningkatan sebesar 3,06% dari tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 nilai evaluasi AKIP Kecamatan Jombang hanya tercapai 99,88% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 3,68%. Perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025 dengan mengidentifikasi masalah ditahun 2024 sehingga rencana tindak lanjut akan dilaksanakan di tahun 2025 guna peningkatan kinerja Kecamatan Jombang.

Sedangkan capaian kinerja pada sasaran strategis yang kedua yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Jombang dapat dibandingkan dari tabel diatas bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat indicator kinerja dengan **Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)**, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Indikator ini telah ditetapkan dengan target 7,01 dan realisasi sebesar 7,91 sehingga tercapai 113%. Hasil yang sangat baik tercapai di tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 dengan target 8 dan realisasi 7,82 dengan capaian 97,75%. Dapat dibandingkan dengan tahun 2023 bahwa terdapat kesenjangan capaian kinerja sebesar 15,25% penurunan yang sangat signifikan.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan kinerja pada tahun 2024:

- ✓ Kualitas sumber daya manusia
- ✓ Proses pelayanan yang tidak efisien
- ✓ Kurangnya inovasi
- ✓ Kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur
- ✓ Faktor internal karena keterbatasan sarana dan prasarana

Sehingga perlu dilakukan evaluasi internal setiap tribulan dan dituangkan pada berita acara evaluasi internal guna peningkatan capaiak kinerja

3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi:

Tabel 3.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPD Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Jombang	75	74,91	99,88%
Meningkatnya kualitas layanan Publik Kecamatan Jombang	Nilai IKPP Kecamatan Jombang	8,0	7,82	97,75%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				98,8%

a. Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Jombang dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jombang dengan target tahun 2024 adalah 75 dapat terealisasi 74,91 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Kinerja pada tahun 2024 sebesar 74,91% dengan target 75% sehingga masih terdapat kesenjangan 0,09% dari jumlah target yang harus dicapai. Namun secara kualitatif realisasi kinerja tercapai 99,88% dimana sudah akan mendekati 100%. Secara kuantitatif masih belum mencapai target.

Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jombang pada tahun 2024 belum tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan beberapa faktor antara lain:

Analisis Kualitatif:

- Faktor Internal : Dimana sumber daya yang tidak memadai (anggaran, SDM, peralatan), proses kerja yang kurang efisien, kurangnya koordinasi antar kecamatan dengan kelurahan, serta lemahnya pengendalian internal.
- Faktor Eksternal: yaitu dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi yang belum stabil.

Analisis Data

- Laporan Pertanggung jawaban yang sulit untuk ditelusuri yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dimana program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 terdapat perubahan pada nomenklatur sehingga untuk membandingkan capaian realisasi kinerja dari tahun 2022, 2023 dan 2024 kurang sinkron.

Rekomendasi Perbaikan

- Dilakukan perumusan rekomendasi dengan dilakukan perbaikan capaian kinerja yang spesifik, terukur dapat dicapai, relevan dan berorientasi pada waktu.
- Dilakukan perbaikan proses kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan system pengendalian internal

- Dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang lebih spesifik untuk mencapai target di tahun yang akan datang
- Rekomendasi teknis dimana dilakukan perbaikan system informasi dan penggunaan teknologi.

Untuk mencapai perbaikan target Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan dengan:

- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang lebih terukur dan mudah dicapai
- Pelaporan kinerja yang efektif
- Evaluasi Internal yang berkesinambungan
- Tidak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dan dilakukan secara efektif
- Penyusunan rencana aksi disesuaikan dengan data yang relevan
- Penyusunan KAK yang sesuai jadwal untuk mendukung target kinerja
- Penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur sesuai dengan kegiatan serta rencana kinerja yang diintervensi
- Penyusunan pohon kinerja yang tersusun dalam dokumen perencanaan kinerja
- Dilakukan analisis terhadap hasil evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target

b. Sasaran II : Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Jombang

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Jombang dengan indikator kinerja indek kualitas pelayanan publik (IKPP) Kecamatan Jombang. Nilai IKPP didasarkan penggabungan dari nilai IKM dan Nilai IPP 2024. Nilai IKPP Kecamatan Jombang dengan target tahun 2024 adalah 8,0 dapat terealisasi 7,82 tercapai sebesar 97,75 % (masih dibawah target). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Nilai IKPP mengalami penurunan dari sebelumnya 7,91 menjadi 7,82 atau turun sebesar 2%

Nilai IKPP tahun 2024 mengalami kesenjangan antara target dengan realisasi sebesar 0,18%. Pada tahun 2023 Nilai IKPP Kecamatan Jombang tercapai 7,91 dari target 8, pada tahun 2023 dan 2024 masih belum mencapai target. Terdapat kesenjangan capaian reaktivasi kinerja tahun 2023 sebesar 0.09%. Sedangkan capaian realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 juga terdapat kesenjangan 2% artinya terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 2%.

Penurunan capaian kinerja pada tahun 2024 yang disebabkan beberapa faktor diantaranya:

1. Penurunan Kualitas Pelayanan yang disebabkan karena :

- **Fasilitas yang kurang memadai** yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta keterbatasan anggaran kecamatan
- **Sumber daya manusia yang kurang**, SDM yang kurang baik jumlah maupun kemampuan dalam melaksanakan pelayanan public.
- **akuntabilitas yang kurang**, dimana pertanggungjawaban atas pelayanan yang diberikan, sehingga masyarakat akan merasa tidak diperhatikan

Untuk percepatan perbaikan target Nilai IKPP Kecamatan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan public
2. Penyederhanaan birokrasi
3. Peningkatan partisipasi masyarakat
4. Penguatan kapasitas aparatur

Pentingnya dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut diatas diharapkan target nilai IKPP Kecamatan Jombang dapat tercapai dan kualitas penyelenggaraan pemerintah dapat meningkat.

Berikut dapat dilihat Perbandingan Realisasi Program Tahun 2024 s.d dengan akhir Periode Renstra pada tabel dibawah:

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	NILAI IKM		√		84	84,4	N/A	N/A	N/A	84,85	85,47	N/A	N/A	N/A	101	107	N/A	N/A	N/A
2	<i>Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Jombang Minimal BAIK</i>				62,83	N/A	N/A	N/A	N/A	62,83	62,00	N/A	N/A	N/A	105	N/A	N/A	N/A	N/A
7	<i>Nilai Evaluasi SAKIP</i>				62,83	70,01	70,01	N/A	N/A	62,83	60,04	64,45	N/A	N/A	100,53	85,56	92,05	N/A	N/A
14	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Perubahan Renstra PD Tahun 2018 – 2023 (Pertama)																			
38	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		√		N/A	60	62	62	N/A	N/A	N/A	48,60	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A
39	<i>Nilai SAKIP</i>				62,5	70,01	70,01	N/A	N/A	60,05	60,04	70,37	N/A	N/A	96,08	85	100,5	N/A	N/A
40	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
107	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		√		N/A	7,74	7,79	7,84	N/A	N/A	N/A	84,	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
108	<i>IKM Kecamatan Jombang</i>				83,58	84	84,4	87	N/A	84,85	85,47	87,74	N/A	N/A	N/A	101	103	N/A	N/A
109	<i>IPP Kecamatan Jombang</i>				N/A	3,17	3,17	3,17	N/A	2,8	3,15	-	N/A	N/A	N/A	97	-	N/A	N/A
110	Nilai Paten Kecamatan				N/A	81	82	83	N/A	79,75	83,38	84,47	N/A	N/A	N/A	101	101	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
111	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	100	100	100	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
112	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
114	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
115	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%			N/A	0	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	
121	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
124	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
125	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
126	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A
129	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	N/A
130	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra PD Tahun 2023 - 2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2.Indeks Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Jombang			N/A	83,58	84	84,4	N/A	N/A	84,85	85,47	87,74	N/A	N/A	N/A	101	103	N/A
		IPP Kecamatan Jombang			N/A	N/A	3,17	3,17	N/A	N/A	2,8	3,15	-	N/A	N/A	N/A	98	-	N/A

		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait		N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100	N/A	N/A	N/A	100%	100	N/A
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu		N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desea/Perubahan APB Desa tepat waktu		N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
1	PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur		N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
2	PROGRAM Nilai Paten Kecamatan Jombang																	
				N/A	N/A	80	81	82	N/A	N/A	79,75	83,38	84,47	N/A	N/A	100	100	100
3	Program 1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi																	
				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100%	100	100
	2. Jumlah Lembaga/ badan Kemasyarakatan Desa/ kelurahan yang aktif			N/A	N/A	N/A	36	36	N/A	N/A	N/A	36	36	N/A	N/A	N/A	100%	100 %

	3.Persentase Rata-rata Capaian Kinerja kelurahan			N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
	4.Persentase Penyampaian laporan Kegiatan kelurahan Tepat waktu			N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	PROGRAM																	
	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
5	PROGRAM																	
	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%

6	PROGRAM Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan																	
				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Perbandingan Realisasi anggaran dari ahun 2022 sampai dengan akhir renstra 2026. Belum dapat dibandingkan secara simultan. Namun disbanding secara periode dengan menyesuaikan perubahan periode renstra perangkat daerah dimana perubahn tersebut juga harus menyesuaikan dengan nomenklatur yang sesuai dengan Kemendagri. Sehingga perbaindingan capaian realisasi pada periode renstra terdapat 3 perbaindingan mulai dari tahun 2020 s/d 2023. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 belum dibandingkan secara sejajar karena program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2024	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Keterangan
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai valuasi AKIP Kec. Jombang	74,91 (BB)	72,70 (BB)	83,86	Sudah diatas Kab, Masih dibawah Provinsi
2	Meningkatnya kualitas layanan Publik Kecamatan Jombang	Nilai IKPP Kecamatan Jombang	7,82	8,45	-	Masih dibawah Kabupaten

Sumber: Data Bagian Organisasi Kab. Jombang, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Realisasi nilai evaluasi AKIP Kecamatan Jombang belum berhasil memenuhi standar Kabupaten dan Provinsi dikarenakan ada beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya:
 - ✓ Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum memenuhi kriteria SMART
 - ✓ Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perbaikan rencana Aksi pegawai terhadap tindaklanjut yang harus dilakukan
 - ✓ Dokumen Laporan kinerja belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai

3.1.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja

1. Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Pada tahun 2024 target nilai evaluasi AKIP Kecamatan Jombang adalah 75 realisasi 74,91 (tercapai 98,88%). Capaian kinerja Kecamatan Jombang pada tahun 2024 sudah dapat mencapai target yang ditetapkan, walaupun belum signifikan.

2. Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Jombang

Pada tahun 2024 Kecamatan Jombang sudah dapat mencapai target yang ditetapkan namun perlu adanya perbaikan dan sinergi dari masing-masing stakeholder untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.5.1 Faktor Penunjang/ penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja:

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Jombang, Kepala UPTD/B se Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Jombang untuk mencapai tujuan organisasi

3.1.5.2 Faktor penghambat/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai
- d. Implementasi pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.

3.1.5.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir triwulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung jawab bersama.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra 2018-2024 Kecamatan Jombang yakni meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Jombang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Jombang langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Secara jumlah SDM yang ada di Kecamatan Jombang sangat kurang, karena ada yang pensiun dan mutasi. Sehingga ada beberapa Kasi yang tidak mempunyai staf/ pelaksana.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

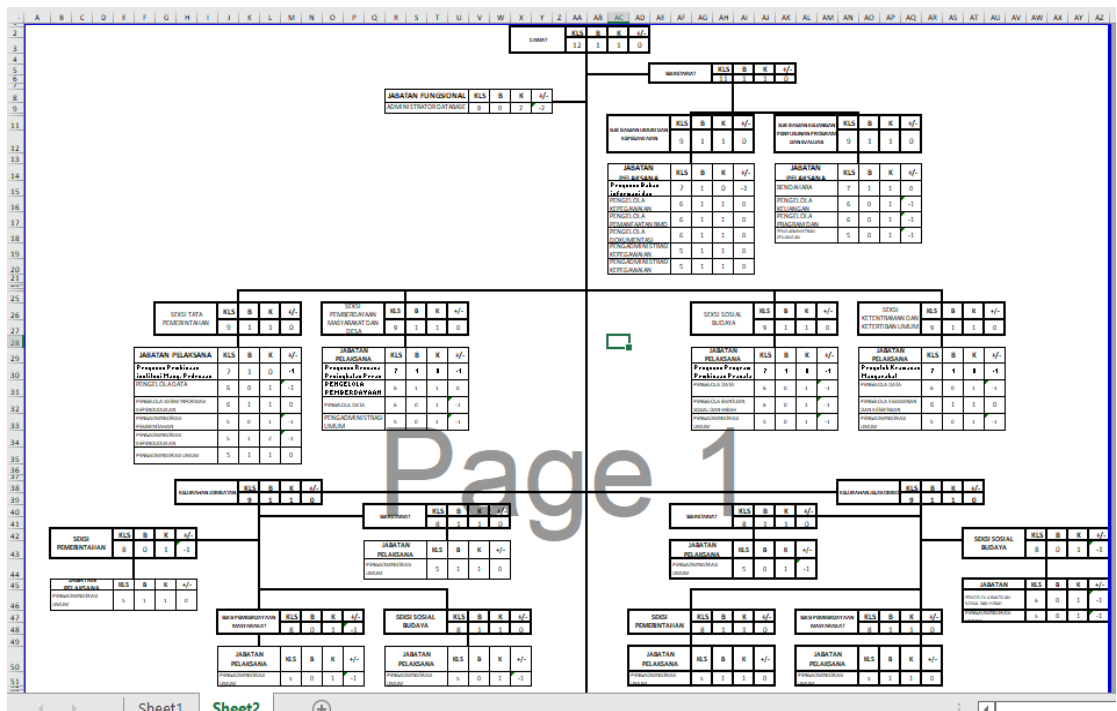
Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya

Gambar 3.1

Peta Jabatan



b. Sarana dan Prasarana Yang Tersedia

Secara keseluruhan jumlah sarana prasarana / perlengkapan kantor beserta kondisinya yang ada di Kecamatan Jombang dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dapat tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Jumlah sarana dan Prasarana Beserta Kondisinya

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas R2	53	51	-	2
3	Mobil Siaga Desa	4	4	-	-
4	Kendaraan Dinas R2 (Desa)	-	-	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	2	2	-	-
2	AC Split	17	16	-	1
3	Filling Besi	3	3	-	-
4	Lemari Besi	8	8	-	-
5	White Board	1	1	-	-
6	Lemari Kayu	8	8	-	-
7	Zice	1	1	-	-
8	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	-
9	Meja Rapat	19	19	-	-
10	Meja Tulis			-	-
11	Kursi Rapat	106	106	-	-
12	Kursi Biasa	71	71	-	-
13	Kursi Tamu			-	-
14	Bangku Tunggu	3	3	-	-
15	Kursi Lipat	57	57	-	-
16	Meja Tambahan	1	1	-	-
17	Jam			-	-
18	Kipas Angin	6	6	-	-
19	Kompas Gas	1	1	-	-
20	Alat Dapur lainnya	1 set	1 set	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
21	Televisi	8	8	-	-
22	Podium	1	1	-	-
23	P C	27	27	-	-
24	Laptop	16	16	-	-
25	Printer	32	32	-	11
26	CPU			-	-
27	Monitor			-	-
28	Meja kerja pejabat eselon III	1	1	-	-
29	Kursi kerja pejabat eselon III	1	1	-	-
30	Kursi kerja pejabat eselon IV	1	1	-	-
31	Soundsystem	4	4	-	-
32	Alat pemadam kebakaran	4	4	-	-
33	Papan nama instansi	1	1	-	-
34	Sofa	2	2	-	-
35	Lemari Es	1	1	-	-
36	Proyektor + Attachment			-	-
37	Generator			-	-
38	Gedung kantor permanen	3	3	-	-
39	Tempat ibadah permanen	1	1	-	-
40	Balai gedung pertemuan permanen	1	1	-	-
41	Rumah tempat tinggal permanen kelas Ia			-	-
42	Instalasi pusat pengatur listrik lainnya	1	1	-	-
43	Maket dan Foto dokumen lainnya			-	-
44	Rak Kayu	4	4		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
45	Lemari kaca	2	2		
46	Alat penghancur kertas	1	1		
47	Mesin Absensi	6	6		
48	Mesin Antrean Paten	1	1		
49	Taman Bermain Paten	1	1		
50	Gedung Pos Jaga	1	1		
51	Pagar permanen	1	1		
52	AC window	2	2		
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	3	3		
54	Tanah Sawah Irigasi	1	1		
55	Portable Generating Set	1	1		
56	Station Wagon	1	1		
57	Mesin Gergaji	1	1		
58	Alat Timbangan/Biara lainnya(dst)	2	2		
59	Penyemprot Tangan (Hand Spray)	1	1		
60	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2	2		
61	Brandkas	1	1		
62	Papan Visual/Papan Nama	1	1		
63	LCD Projector/Infocus	1	1		
64	Kotak Surat	1	1		
65	Alat Kantor Lainnya	3	3		
66	Meja Kerja Kayu	21	21		
67	Kursi Besi/Metal	21	21		
68	Kursi Kayu	26	26		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
69	Meja Resepsionis	1	1		
70	Meja ½ Biro	11	11		
71	Kursi Putar	6	6		
72	Mesin Pemotong Rumput	1	1		
73	Wireless	1	1		
74	Lambang Garuda Pancasila	2	2		
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	2		
76	Dispenser	1	1		
77	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1		
78	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4	4		
79	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	50	50		
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	7		
81	Compact Disc Player	4	4		
82	Digital LED Running Text	1	1		
83	Layar Film/Projector	4	4		
84	Telephone(PABX)	1	1		
85	Meja Kerja	2	2		
86	Note Book	4	4		
87	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1		
88	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1	1		
89	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1		
90	Jembatan Lainnya	1	1		
91	Peta (Map)	1	1		
92	Tempat Bendera	1	1		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
93	Podium	1	1		
94	Tangga	1	1		

Sumber : Data Kecamatan Jombang, 2024

Berdasarkan Tabel 3.2.1 dapat terlihat bahwa untuk kendaraan dinas secara umum tercukupi. Namun khusus roda 2 yang berada di Kecamatan meskipun jumlahnya cukup tetapi kondisi kendaraan sudah berumur tua. Sehingga diperlukan kendaraan dinas baru dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan barang / perlengkapan gedung kantor PATEN jumlah sampai saat ini sudah terpenuhi : komputer, laptop, printer, LCD, scanner, serta peralatan elektronik lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan kenyamanan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, luas bangunan Kantor Kecamatan Jombang yang cukup luas juga membutuhkan biaya pemeliharaan rutin yang cukup besar setiap tahun agar gedung dan bangunan dapat terjaga dan terawat dengan baik.

Terhadap peningkatan pelayanan PATEN juga masih membutuhkan tambahan sarana prasarana seperti : ruang smooking area , dan kelengkapan lainnya dikarena sampai saat ini sarana prasarana tersebut belum tersedia dan belum teranggarkan karena keterbatasan biaya.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Jombang melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Jombang	99,88%	94%	6,3%
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Jombang	Nilai IKPP Kecamatan Jombang	97,75%	92%	5,6%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			98,8%	92,44%	5,95%

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran dari sasaran pertama dan kedua. Penjelasan hasil perbandingan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan
 Dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Kecamatan Jombang maka pada tahun 2024 ditetapkan target Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Jombang 75 (BB) dan realisasi 74,91 (BB) sehingga capaian kinerjanya 99,88%. Untuk menjalankan sasaran I ini Kecamatan Jombang didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 7.350.305.207 dan terealisasi Rp. 6.911.644.183 (capaian 94%). Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 6,3%.
- b. Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Kecamatan Jombang
 Dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Kecamatan Jombang maka pada tahun 2024 ditetapkan :
 1. Indikator Kinerja dengan Nilai IKPP Kec. Jombang di dukung beberapa program antara lain:
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 17.660.000,-dan terealisasi Rp. 16.474.500,-(capaian 93,29%). Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100%

dari target nilai 100%. Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0,7%.

- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp. 66.507.500,- dan terealisasi Rp. 63.632.000,- (capaian 95,67%). Sedangkan untuk capaian indikator kinerja tahun 2024 ini nilai IPP tercapai 98,43% dari target nilai IPP 3,3 tercapai 3,25. Jika dibandingkan dengan nilai IPP Tahun 2023, nilai IPP tahun 2024 masih tetap sama. Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 8,5%.
2. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait didukung dengan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum dengan anggaran Rp. 18.580.000,- dan terealisasi Rp. 18.446.750,- (capaian 99,28%).
3. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu didukung dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 17.310.000,- dan terealisasi Rp. 16.474.500,- (capaian 95,18%).
4. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 86.360.000,- dan terealisasi Rp. 83.492.000,- (capaian 96,67%).
5. Sedangkan untuk capaian penyerapan anggaran di masing – masing Kelurahan untuk Program pemberdayaan Desa dan kelurahan sebagai berikut:
 - Kelurahan jelakombo dari anggaran Rp. 1.149.304.183,- terealisasi sebesar Rp. 1.123.190.781,- (97%) .
 - Kelurahan kepanjen dari anggaran Rp. 1.258.864.164,- terealisasi sebesar Rp. 1.184.307.649,- (93,97%) .
 - Kelurahan Kaliwungu dari anggaran Rp. 1.160.916.404,- terealisasi sebesar Rp. 1.128.824.762,- (95,49%)
 - Kelurahan Jombatan dari anggaran Rp. 1.138.023.175,- terealisasi sebesar Rp. 898.738.532,- (82%) .

Total Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Jombang tahun 2024 didukung dengan 6 Program tersebut diatas dengan anggaran Rp.

11.451.341.651,- dan terealisasi Rp. 10.705.594.678,- (capaian 93,48%). Sedangkan untuk capaian kinerja sebesar 98,8%. Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 5,6%.

3.2.3 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jombang Tahun 2024, bahwa untuk mendukung tujuan organisasi ditetapkan 2 sasaran strategis Kecamatan dan untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2024 ini Kecamatan Jombang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11.451.341.651 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.705.594.678 atau serapan dana APBD mencapai 93,48 % sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran Silpa Rp.745.746.973 Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Alokasi Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Jombang	7.350.305.207	6.911.644.183	94%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Kecamatan Jombang	Nilai IKPP Kecamatan Jombang	4.101.036.444	3.793.950.495	92,5 %
TOTAL			11.451.341.651	10.705.594.678	93,48%

**Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100%	7.323.942.969	6.460.592.368	Sangat Men Unjang	88,21%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	23.014.000	19.080.200	Sangat menunjang	94,70%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	9.364.000	7.685.200	Sangat Menunjang	82,07%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	5 Laporan Laporan	13.650.000	11.395.000	Sangat Menunjang	83,47%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	5.874.863.577	5.531.511.868	Sangat Menunjang	98,5%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	42 orang/ bulan	5.614.693.577	5.271.341.898	Sangat Menunjang	93,88%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
ASN	ASN lingkup Kec. Jombang					
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	2.200.000	2200.000	Sangat Menunjang	100%
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Kec Jombang)	Jumlah dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	77.850.000	77.850.000	Sangat Menunjang	100%
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Kelurahan Jelakombo)	Jumlah dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	44.520.000	44.520.000	Sangat Menunjang	100%
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Kelurahan Kepanjen)	Jumlah dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	44.520.000	44.520.000	Sangat Menunjang	100%
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Kelurahan Kaliwungu)	Jumlah dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	44.520.000	44.520.000	Sangat Menunjang	100%
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Kelurahan ...)	Jumlah dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	46.560.000	46.560.000	Sangat Menunjang	100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Jombatan)	SKPD					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%		109.580.140	Sangat Menunjang	92,66%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor Kec. Jombang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	11Paket	4.704.850	4.703.400	Sangat Menunjang	99,97%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor Kel.Jelakombo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	3.623.700	3.621.700	Sangat Menunjang	99,94%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor Kel.Jombatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	2.792.900	2.791.700	Sangat Menunjang	99,96%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor Kel. Kepanjen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 pakets	3.039.300	3.039.300	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor Kel. Kaliwungu	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 pakets	1.301.650	0	Sangat Menunjang	0%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kec. Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33paket	22.624.750	22.569.860	Sangat Menunjang	99,76%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kel.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	10 paket	11.683.300	10.212.960	kurang Menunjang	87,42%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Jelakombo	disediakan					
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel Kepanjen	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	4.342.300	3.801.400	Sangat Menunjang	89,85%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Jombatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	24.554.000	24.553.150	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Kaliwungu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 paket	5.934.200	5.899.000	Sangat Menunjang	99,41%
Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Jombang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	60.500.000	45.820.000	Sangat Menunjang	75,74%
Penyediaan bahan logistik kantor Kel Jelakombo	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	26.620.000	19.450.000	Sangat Menunjang	73,07%
Penyediaan bahan logistik kantor Kel. jombatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	29.040.000	22.470.000	Sangat Menunjang	85%
Penyediaan bahan logistik kantor Kel. kepanjen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	29.040.000	24.000.000	Sangat Menunjang	82,64%
Penyediaan bahan logistik kantor Kaliwungu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	26.620.000	22.090.000	Sangat Menunjang	82,98%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Jombang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	7.997.000	7.698.350	Sangat Menunjang	96%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Jelakombo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	5.249.500	4.055.100	menunjang	77%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Kepanjen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	3.550.000	3.550.000	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Kaliwungu	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	1.126.500	1.126.500	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Jombatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	8.059.000	8.056.900	Sangat Menunjang	99,92%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	2.220.000	2.220.000	Sangat Menunjang	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	27.965.200	27.961.500	Sangat Menunjang	99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	250.989.430	244.717.650	Sangat Menunjang	97,5%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kec Jombang	Jumlah unit pengadaan sarana gedung kantor lainnya yang disediakan	10 unit	56.240.980	50.057.500	Sangat Menunjang	89,01%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Jelakombo	Jumlah unit pengadaan sarana gedung kantor lainnya yang disediakan	10 unit	32.529.600	32.469.600	Sangat Menunjang	99.82%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Kepanjen	Jumlah unit pengadaan sarana gedung kantor lainnya yang disediakan	10 unit	57.439.050	57.436.250	Sangat Menunjang	100%
Pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah unit pengadaan sarana	10 unit	16.023.500	15.998.000	Sangat Menunjang	99,84

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Kaliwungu	gedung kantor lainnya yang disediakan					
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Kel. Jombatan	Jumlah unit pengadaan sarana gedung kantor lainnya yang disediakan	6 unit	88.756.300	88.756.300	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	579.230.000	555.530.986	Sangat Menunjang	95,90%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kec Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	88.800.000	72.584.712	Sangat Menunjang	82%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Jelakombo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	8.100.000	8.100.000	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Kepanjen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	17.700.000	11.669.357	Sangat Menunjang	66%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Jombatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	16.800.000	7.680.957	Sangat Menunjang	45%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kel. Kaliwungu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12.130.000	9.720.000	Sangat Menunjang	80%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kec	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	2laporan	441.300.000	351.760.972	Sangat Menunjang	80%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Jombang	yang disediakan					
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel. Jelakombo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	1 laporan	13.920.000	13.920.000	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel. Kepanjen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	1 laporan	11.520.000	11.520.000	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel. Jombatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	1 laporan	4.950.000	4.700.000	Sangat Menunjang	95%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kel. Kaliwungu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	1 laporan	9.900.000	9.900.000	Sangat Menunjang	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	238.867.655	224.982.351	Sangat Menunjang	94, 18 %
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	27.525.000	23.543.351	Sangat Menunjang	86%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	20 unit			Sangat Menunjang	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara		3.748.000	474.500	Sangat Menunjang	42,00%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
lapangan Kel. Jelakombo						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	3 unit			Sangat Menunjang	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kel. Kepanjen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara		-	-	Sangat Menunjang	-
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya				Sangat Menunjang	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kel. Kaliwungu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	1.253.700	429.500	Sangat Menunjang	34%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya				Sangat Menunjang	
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Kec Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	9 unit	9.520.000	6.465.000	Sangat Menunjang	68%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Kel. Jelakombo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	2 unit	2.800.000	2.070.000		85,35%
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara	1 gedung	194.020.955	192.000.000	Sangat Menunjang	99,51%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	93,91	17.660.000	16.474.500	Sangat Menunjang	93,29%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	17.660.000	16.474.500	Sangat Menunjang	93,29%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	4 laporan	17.660.000	16.474.500	Sangat Menunjang	93,29%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	66.507.500	63.632.000	Sangat Menunjang	95,67%
	Persentase rekomendasi forkompimcam yang ditindaklanjuti	100%				
Penyelenggaraan Urusan	Jumlah laporan pelaksanaan	4 laporan	66.507.500	63.632.000	Sangat Menunjang	95,67%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	PHBN/ PHBA					
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam	4 rekomendasi				
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	18.227.500	17.990.000	Sangat Menunjang	98,70%
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 dokumen	48.280.000	45.642.000	Sangat Menunjang	94,54%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100 %	18.580.000	18.446.750	Sangat Menunjang	99,28%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi perapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 %	18.580.000	18.446.750	Sangat Menunjang	99,28%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan	12 laporan	18.580.000	18.446.750	Sangat Menunjang	99,28%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	atau kepolisian republik indonesia					
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	100%	17.310.000	16.477.000	Sangat Menunjang	95,19%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban APBDes dengan lengkap	16 Desa	17.310.000	16.477.000	Sangat Menunjang	95,19%
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	32 Laporan	17.310.000	16.477.000	Sangat Menunjang	95,19%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan Pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	4.101.125.913	3.805.716.552	Sangat Menunjang	92,79%
	Persentase rata-rata capaian kinerja kelurahan	100%				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Menyusun RKPDes	16 Desa	86.360.000	83.492.000	Sangat Menunjang	96,67%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan	36 lembaga			Sangat Menunjang	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
	Masyarakat Desa yang dibina					
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4 Laporan	71.515.000	68.717.000	Sangat Menunjang	96%
Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 lembaga	14.845.000	14.775.000	Sangat Menunjang	99,53%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	100%	3.145.294.863	2.914.206.977	Sangat Menunjang	92%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		1.291.049.307	1.282.593.445	Sangat Menunjang	99%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga/badan usaha pemberdayaan masyarakat desa yang dibina		1.801.277.056	1.586.911.782	Sangat Menunjang	88%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		52.968.500	44.701.750	Sangat Menunjang	84%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/ Kurang	%
2	3	4	5			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jombatan	Jumlah lembaga/badan usaha pemberdayaan masyarakat desa yang dibina		682.111.000	491.185.750	Sangat Menunjang	72%
Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		842.533.050	793.692.825	Sangat Menunjang	94%
Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		631.552.000	595.252.500	Sangat Menunjang	94%
Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan		160.955.300	160.156.325	Sangat Menunjang	99%
Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		50.025.750	38.284.000	Sangat Menunjang	76%
JUMLAH			11.451.341.651	10.705.594.678	Sangat Menunjang	93,48 %

3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2024 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

TABEL 3.3
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1	Melaksanakan SOP pengumpulan data sesuai ketentuan sehingga data kinerja dapat ditelusuri dengan mudah	Melakukan reviu SOP pengumpulan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 kegiatan	6 bulan	CAMAT	Dilaksanakan pada bulan Januari atau sebelum evaluasi Sakip tahun 2024
2	Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (SDM yang kompeten, sumber dana yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai) pada LKJIP	Melakukan perbaikan data pada Dokumen LKJIP	1 dokumen	2 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
3	Melakukan perbaikan pada dokumen laporan kinerja, sehingga menjadi dasar penilaian terhadap pegawai yang bekerja atau tidak bekerja	Dokumen laporan kinerja (LKJIP) telah memuat semua informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan kinerja sesuai dengan Perbub	1 dokumen	3 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara memadai dengan meningkatkan kompetensi Tim Evaluator Internal Kecamatan	Melakukan rapat internal oleh Tim evaluasi sakip Internal Kecamatan Jombang terkait TL hasil sakip dan strategis dalam	1 kegiatan	3 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
	Jombang	meningkatkan nilai sakip untuk tahun berikutnya				
5	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta digunakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja	Melakukan rapat internal oleh Tim evaluasi sakip Internal Kecamatan Jombang terkait TL hasil sakip dan strategis dalam meningkatkan nilai sakip untuk tahun berikutnya	1 kegiatan	3 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
6	Memanfaatkan atas hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja sehingga mampu memberikan perbaikan dan peningkatan kinerja	Tidak dilakukan perbaikan data/ dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi sehingga nilai Sakip Kecamatan Jombang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan	1 kegiatan	3 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
7	Melakukan evaluasi atas capaian kinerja pada setiap tribulan agar dapat mengetahui target yang belum tercapai pada tiap tribulan	Dilaksanakan rapat internal kecamatan jombang dengan membahas evaluasi capaian kinerja per tribulan	1 kegiatan	3 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
8.	Memfaatkan informasi dalam laporan kinerja sesuai dengan fungsinya sehingga dapat mempengaruhi dalam : I,ii,iii,iv yang selanjutnya berdampak pada perbaikan budaya kerja organisasi	Dokumen laporan kinerja (LKJiP) telah memuat semua informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan kinerja sesuai dengan Perbub	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Jombang berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2024 Kecamatan Jombang. Laporan kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta Analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Jombang.

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 98,8 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 75 telah tercapai 74,91 dengan Tingkat capaian 99,88% berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/542/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d Semester I Tahun 2024.
2. IKM Kecamatan Jombang ditargetkan 92 telah tercapai 92,32 dengan tingkat capaian 100,3%. Untuk lebih meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Jombang ditargetkan 3,3 telah tercapai 3,20 dengan tingkat capaian 96%

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh

terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2024 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode RPD TA 2024-2026.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Jombang untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Indikator sasaran nilai SAKIP, berdasarkan hasil revidi dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
 - Monitoring jangka menengah renstra menyimpulkan pencapaian kinerja dengan memberikan alternatif perbaikan untuk ke depannya
 - Proses penganggaran tidak dilakukan pendekatan anggaran terhadap program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dengan prioritas daerah (Money follow program)
 - SOP Pengumpulan data menyajikan alur yang jelas berikut penanggung jawab setiap tahapannya
 - Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
 - Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga hasil evaluasi internal dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.
2. Indikator sasaran nilai IKM, berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana yaitu:
 - a. Kompetensi petugas
 - Penerapan system reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab.Jombang.
3. Indikator sasaran nilai IPP Kecamatan Jombang akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu:
 - a. Aspek Kebijakan Pelayanan
 - Informasi SKM agar dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media social dan media cetak

- b. Aspek Profesionalisme SDM
 - Penerapan system reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.
- c. Aspek Sarana danPrasarana
 - Sarana dan Prasarana Direncanakan pada PAK 2024 akan dilaksanakan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana Paten yang belum ada.
- d. KonsultasidanPengaduan
 - Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website,dokumen/arsiplainnya
- e. INOVASI
 - Pelayanan kecamatan Jombang menampilkan/ memamerkan produk unggulan desa dalam rangka mempromosikan produk-produk unggulan desa.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jombang diharapkan dapat memberikan Gambaran kinerja Kecamatan Jombang kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jombang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2024.

Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Jombang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2024 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM personil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Jombang, 20 Januari 2025



KAMAT JOMBANG

DR. H. HERY PRAYITNO

Pembina TK I

NIP. 196708241986021002